

Hibriditas Komunikasi Politik dan Birokrasi: Analisis Program "Berani Cerdas" Gubernur Sulawesi Tengah dalam Perspektif Masyarakat dalam Jaringan

The Hybridity of Political Communication and Bureaucracy: An Analysis of the Central Sulawesi Governor's "Berani Cerdas" Program in a Network Society Perspective

Ubaidillah¹, Ilyas¹, Achmad Herman¹, Raisa Alatas²

¹Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Tadulako, ²Kocaeli University, Turkiye

Korespondensi: Tondo, Palu Timur, Palu City, Central Sulawesi 94148

Surel: abit06111@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46961/mediasi.v7i1.1878>

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 05/12/2025

Direvisi: 29/01/2026

Publikasi: 31/01/2026

e-ISSN: 2721-0995

p-ISSN: 2721-9046

Kata Kunci:

Komunikasi Politik;
Politik Entrepreneur;
Program Berani Cerdas;
Inovasi Kebijakan;

Keywords:

Political Communication;
Policy Entrepreneur;
Berani Cerdas Program;
Policy Innovation.

ABSTRAK

Dalam era desentralisasi, kesenjangan antara janji politik yang populis dan realitas implementasi birokrasi sering kali menjadi hambatan utama pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi politik Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dalam mengimplementasikan inovasi kebijakan pendidikan gratis "Berani Cerdas". Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain constructivist-policy analysis, penelitian ini merekonstruksi teori komunikasi politik Dan Nimmo yang didialogkan dengan konsep Network Society. Pengumpulan data dilakukan melalui process tracing, wawancara mendalam, dan netnografi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gubernur berhasil bertransformasi dari aktor politik elektoral menjadi Policy Entrepreneur dengan memanfaatkan rekam jejak teknokratis sebagai modal kredibilitas; (2) Strategi komunikasi yang diterapkan bersifat hibrida (omni-channel), mengintegrasikan otoritas legal-formal, media massa konvensional, dan viralitas digital untuk menjangkau masyarakat lintas generasi; (3) Khalayak (mahasiswa) tidak lagi menjadi konsumen pesan pasif, melainkan bertindak sebagai Network Validators yang memverifikasi janji politik melalui pengalaman empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi politik bukan sekadar alat pencitraan, melainkan instrumen strategis untuk mengendalikan kinerja birokrasi (bureaucratic enforcer) dan memobilisasi partisipasi publik, sehingga mampu menjembatani retorika visi politik dengan realitas layanan publik.

ABSTRACT

In the era of decentralization, the gap between populist political promises and the reality of bureaucratic implementation often hinders regional development. This study aims to analyze the political communication strategy of the Governor of Central Sulawesi, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., in implementing the "Berani Cerdas" free education policy innovation. Employing a qualitative approach with a constructivist-policy analysis design, this research reconstructs Dan Nimmo's political communication theory by dialoguing it with the concept of the Network Society. Data collection was conducted through process tracing, in-depth interviews, and netnography. The findings indicate that: (1) The Governor successfully transformed from an electoral political actor into a Policy Entrepreneur by leveraging his technocratic track record as credibility capital; (2) The communication strategy employed is hybrid (omni-channel), integrating legal-formal authority, conventional mass media, and digital virality to reach cross-generational audiences; (3) The audience (students) are no longer passive message consumers but act as Network Validators who verify political promises through empirical experience. This study concludes that political communication serves not merely as a branding tool, but as a strategic instrument to enforce bureaucratic performance (bureaucratic enforcer) and mobilize public participation, effectively bridging the gap between political rhetoric and the reality of public services.

PENDAHULUAN

Aksesibilitas pendidikan tinggi telah menjadi isu sentral dalam diskursus pembangunan berkelanjutan. Namun, kesenjangan antara kebijakan afirmatif dan realitas partisipasi publik masih menjadi tantangan besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tingkat nasional, desentralisasi memberikan otonomi bagi kepala daerah untuk merancang kebijakan pendidikan, namun sering kali kebijakan tersebut terjebak dalam jebakan populisme sehingga janji politik ambisius yang belum tentu dapat dipahami serta mampu melibatkan masyarakat karena lemahnya strategi komunikasi (Lopilalang, 2023). Fenomena ini menuntut pemimpin daerah untuk tidak hanya piawai dalam merancang kebijakan, tetapi juga dalam mengelola komunikasi politik yang mampu menjembatani ekspektasi publik dengan kompleksitas birokrasi (Mukarom, 2016).

Dalam lanskap Provinsi Sulawesi Tengah, isu disparitas pendidikan terekam jelas melalui tingginya angka putus sekolah yang mencapai 4.509 anak serta ketimpangan akses perguruan tinggi. Merespons hal ini, Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. (2025-2030) menginisiasi program "Berani Cerdas", sebuah kebijakan radikal berupa beasiswa kuliah gratis tanpa syarat administratif yang rumit. Program ini merupakan upaya replikasi dan eskalasi dari keberhasilan model kebijakan yang pernah diterapkannya di Kabupaten Morowali, yang secara statistik mampu mendongkrak partisipasi mahasiswa dari 700 menjadi 4.600 dalam dua tahun.

Namun, transisi kebijakan dari level kabupaten (Morowali) ke level provinsi (Sulawesi Tengah) menghadirkan problematisasi tersendiri. Skala Provinsi memiliki heterogenitas sosiokultural yang lebih kompleks, struktur birokrasi yang lebih gemuk, dan resistensi politik yang lebih dinamis. "Berani Cerdas" bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan sebuah intervensi politik yang berisiko tinggi. Tanpa komunikasi politik yang strategis, program ini rentan mengalami distorsi informasi, ketidaktepatan sasaran, hingga potensi delegitimasi jika janji "tanpa syarat rumit" berbenturan dengan rigiditas aturan keuangan daerah (Bulumang & Handika, 2018).

Dalam konteks itulah komunikasi politik mengambil tempat penting. Dalam era digital, komunikasi politik pemimpin daerah telah bertransformasi dari pola linier menjadi dialektika yang interaktif (Priyatna dkk, 2020). Oleh sebab itu, tantangan bagi Anwar Hafid bukan sekadar memviralkan program ini di media sosial, melainkan bagaimana mengonversi gagasan politik menjadi partisipasi publik yang masif dan kepatuhan birokrasi. Komunikasi politik dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola ekspektasi dan menyeimbangkan harapan, menyelaraskan kebijakan teknis ke dalam narasi yang resonan dengan karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah yang majemuk, hingga akhirnya membentuk mentalitas masyarakat dari penerima bantuan pasif menjadi partisipan aktif pendidikan.

Literatur terdahulu mengenai komunikasi politik pemerintahan daerah cenderung terpolarisasi pada dua kutub: analisis personal *branding* kepala daerah di media sosial (Habibi dkk.; Karimah; Putra dkk.) atau studi evaluasi kebijakan yang teknokratis. Belum banyak penelitian yang secara spesifik membedah komunikasi politik sebagai variabel determinan dalam keberhasilan inovasi pembangunan daerah yang berskala masif. Kebanyakan studi masih memandang komunikasi sebagai "alat penyampai pesan", bukan sebagai "strategi negosiasi politik" dalam implementasi kebijakan publik.

Penelitian ini menganalisis secara kritis strategi komunikasi politik Gubernur Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Program Berani Cerdas. Studi ini tidak bertujuan untuk mengafirmasi keberhasilan program tersebut, melainkan untuk mengevaluasi bagaimana komunikasi politik digunakan untuk mengatasi

hambatan struktural dan kultural serta menawarkan model teoretis baru tentang peran komunikasi politik dalam inovasi pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Dimensi Komunikasi Politik

Teori komunikasi politik Meadow dan Nimmo (2004) dalam Cangara (2009:35) sering kali dipahami secara linier, namun dalam konteks Program "Berani Cerdas", teori ini perlu dibaca ulang sebagai sebuah ekosistem pertukaran simbolik. Relevansi Nimmo dalam studi ini tidak terletak pada definisi statis komponennya, melainkan pada dinamika interaksi antar-elemen tersebut dalam memvalidasi sebuah kebijakan publik yang ambisius.

Dalam kerangka Nimmo, (2011:30-37) komunikator diklasifikasikan menjadi politikus, profesional, dan aktivis. Namun, Anwar Hafid dalam kasus ini melampaui kategori biner tersebut. Ia merepresentasikan hibriditas antara Politikus (pencari dukungan elektoral) dan Profesional Birokrasi (eksekutor kebijakan). Kredibilitasnya tidak hanya dibangun dari retorika kampanye (*rhetorical vision*), tetapi dari *track record* teknokratis di Morowali. Dalam penelitian ini, Anwar Hafid diposisikan sebagai *Policy Entrepreneur* yang menggunakan komunikasi politik untuk "menjual" inovasi kebijakan kepada dua audiens berbeda: publik (untuk legitimasi) dan birokrasi (untuk kepatuhan implementasi) (Nofria, 2025).

Nimmo, (2011:193) membagi pesan menjadi direktif, pemelihara, dan restoratif. Dari tiga pembagian ini, program "Berani Cerdas" merupakan manifestasi pesan restoratif yang paling kuat. Pesan ini bukan sekadar informasi beasiswa, tetapi mencakup simbol pemulihan harapan bagi masyarakat marjinal yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan tinggi. Pesan ini dikemas untuk mengubah *status quo* kognitif masyarakat Sulawesi Tengah dari pesimisme kemiskinan menjadi optimisme mobilitas sosial. Terakhir, Nimmo (2010:167) menekankan pentingnya saluran komunikasi. Namun, dalam era digital, terjadi pergeseran dari "saluran" menjadi "jaringan". Media sosial bukan lagi sekadar alat transmisi, melainkan ruang negosiasi makna di mana khalayak (mahasiswa, orang tua, pengamat) tidak hanya menerima pesan, tetapi melakukan *framing* ulang (Sjoriada, 2025). Mereka bisa menjadi *amplifier* (penguat pesan) atau *barrier* (penghambat) jika syarat "tanpa prosedur rumit" tidak terbukti di lapangan.

Untuk memahami fenomena komunikasi politik dalam program "Berani Cerdas", pendekatan klasik Dan Nimmo tidak dapat lagi berdiri sendiri sebagai lensa analisis tunggal. Teori Nimmo, yang berakar pada tradisi interaksionisme simbolik, perlu didialogkan secara kritis dengan teori Masyarakat Jejaring (*Network Society*) yang dipopulerkan oleh Manuel Castells dan Jan van Dijk (2013). Dialog antar-teori ini memunculkan pemahaman baru mengenai pergeseran struktur, agensi, dan aliran kekuasaan dalam komunikasi kebijakan publik.

Secara tradisional, Dan Nimmo memandang komunikasi politik sebagai proses linier di mana komunikator (elite politik) mentransmisikan pesan persuasif melalui saluran tertentu untuk membentuk opini publik. Dalam perspektif ini, Gubernur Anwar Hafid diposisikan sebagai "sumber" tunggal yang memiliki otoritas penuh atas narasi "Berani Cerdas". Namun, perspektif *Network Society* mendekonstruksi pandangan ini. Dalam ekosistem digital, pola komunikasi tidak lagi bergerak dari atas ke bawah (*top-down*), melainkan bersifat *rhizomatik* menyebar ke segala arah tanpa pusat yang dominan (Hasfi, 2019).

Dalam konteks program "Berani Cerdas", pesan gubernur tidak berhenti saat konferensi pers selesai. Pesan tersebut masuk ke dalam "ruang alir" (*space of flows*), di mana narasi kebijakan direplikasi, dimodifikasi,

bahkan didebatkan kembali oleh ribuan simpul (*nodes*) jaringan digital. Otoritas pesan tidak lagi ditentukan semata oleh jabatan komunikator (seperti dalil Nimmo), melainkan oleh seberapa kuat pesan tersebut mengalir dan bertahan dalam sirkuit algoritma media social (Hidayat dkk, 2025:165).

Perbedaan paling mencolok antara kedua teori ini terletak pada konseptualisasi khalayak. Nimmo menempatkan masyarakat sebagai "sasaran" persuasi yang perilakunya (misalnya: memilih atau mendukung) merupakan output dari stimulus pesan. Sebaliknya, teori Jejaring memandang masyarakat di era digital bukan lagi sekadar konsumen pesan, melainkan *prosumer* (produsen sekaligus konsumen).

Dalam implementasi "Berani Cerdas", mahasiswa dan orang tua di Sulawesi Tengah tidak menunggu instruksi pasif. Mereka bertindak sebagai validator kebijakan yang aktif. Ketika janji "kuliah gratis tanpa syarat rumit" dilontarkan, jejaring masyarakat langsung bekerja melakukan verifikasi lapangan (fakta empiris) dan membagikannya secara *real time*. Jika teori Nimmo fokus pada bagaimana pemimpin "membentuk citra", teori Jejaring fokus pada bagaimana publik "mengambil alih narasi". Kegagalan dalam pelayanan birokrasi sekecil apapun dapat diamplifikasi oleh jaringan menjadi krisis legitimasi, sebuah dinamika yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam model klasik Nimmo.

Dialog antara kedua teori ini menghasilkan sebuah sintesis teoretis yang relevan untuk penelitian ini, yaitu Komunikasi Politik Hibrida. Model ini mengakui bahwa figur Anwar Hafid tetap membutuhkan elemen-elemen tradisional Nimmo seperti kredibilitas personal, retorika yang kuat, dan manajemen kesan sebagai fondasi awal. Namun, keberlanjutan dan kesuksesan program "Berani Cerdas" sangat bergantung pada mekanisme *Network Society*.

Gubernur berfungsi sebagai hub utama yang menginisiasi kebijakan, namun viralitas dan penerimaan program ditentukan oleh kekuatan jaringan organik mahasiswa. Dengan demikian, komunikasi politik yang efektif dalam kasus ini adalah kemampuan sang pemimpin untuk menavigasi dua alam sekaligus: mempertahankan kewibawaan formal birokrasi (Perspektif Nimmo) sambil menjaga resonansi emosional dan keterbukaan di dalam jaringan digital yang cair (Perspektif Jejaring).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental yang dibingkai dalam paradigma *Constructivist-Policy Analysis*. Pendekatan ini dipilih untuk melampaui deskripsi permukaan; tujuannya adalah membedah bagaimana komunikasi politik Program "Berani Cerdas" tidak hanya diproduksi sebagai pesan verbal, tetapi dikonstruksi, dinegosiasikan, dan divalidasi dalam ekosistem kebijakan yang kompleks. Fokus penelitian adalah dinamika interaksi antara struktur birokrasi dan jejaring publik di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan rentang waktu analisis dimulai sejak peluncuran resmi program pada April 2025, yang menandai fase kritis transisi dari retorika kampanye menuju implementasi teknokratis.

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* strategis untuk merepresentasikan elemen-elemen dalam model komunikasi hibrida (pertemuan antara otoritas formal dan jejaring sosial). Informan dikategorikan dalam empat kelompok, yakni komunikator utama, penerjemah kebijakan, arsitek pesan dan jaringan, serta validator jaringan.

Untuk menangkap realitas komunikasi politik dari program yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, penelitian ini menerapkan triangulasi teknik pengumpulan data yang dimulai dari penelusuran proses. Pada tahap ini, transformasi pesan politik dari pidato inagurasi hingga menjadi dokumen legal formal diposisikan sebagai fokus utama. Penelusuran ini dilakukan melalui dokumentasi dokumen resmi seperti

Peraturan Gubernur atau Petunjuk Teknis dan observasi partisipan pada kegiatan sosialisasi untuk melihat konsistensi narasi.

Tahap di atas diikuti dengan wawancara mendalam guna menggali pengetahuan informan kunci mengenai strategi di balik layar, hambatan birokrasi yang tidak terungkap ke publik, serta motif di balik pemilihan diksi komunikasi tertentu. Terakhir, penelitian ini menganalisis jejak digital di *platform* media sosial. Teknik ini lazim disebut *netnografi* yang digunakan untuk memetakan sentimen publik, melacak pola penyebaran informasi oleh akun-akun *key opinion leaders*, serta mengidentifikasi resistensi atau dukungan organik dari warganet terhadap program Berani Cerdas.

Data-data yang terkumpul dianalisis dengan mengadaptasi model interaktif Miles dan Huberman dalam Abdussamad (2021:160), dengan fokus spesifik pada analisis kesenjangan (*gap analysis*). Data yang terkumpul direduksi dan disajikan untuk melihat diskrepansi antara apa yang dijanjikan komunikator (*rhetorical vision*) dengan apa yang dialami khalayak (*empirical reality*). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menyintesis temuan lapangan dengan proposisi teoritis Dan Nimmo yang telah dimodifikasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan klaim pemerintah dengan testimoni mahasiswa) dan triangulasi metode (membandingkan data wawancara dengan jejak digital).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan analisis komprehensif mengenai dinamika komunikasi politik Gubernur Sulawesi Tengah dalam implementasi Program Berani Cerdas. Analisis ini melampaui deskripsi fenomenologis semata dan masuk ke dalam bedah struktural bagaimana retorika politik ditransformasikan menjadi realitas kebijakan melalui mediasi birokrasi dan validasi jejaring sosial. Pembahasan dibagi menjadi lima bagian yang mencerminkan arsitektur komunikasi kebijakan tersebut.

Dinamika Komunikasi Politik: Transformasi Kredibilitas dari Politisi ke Policy Entrepreneur

Dalam lanskap politik lokal yang sering kali diwarnai oleh defisit kepercayaan publik terhadap janji kampanye, kredibilitas komunikator menjadi variabel determinan utama. Penelitian ini menemukan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., berhasil mereposisi dirinya bukan sekadar sebagai aktor politik elektoral, melainkan sebagai *Policy Entrepreneur* (wirausahawan kebijakan) yang kredibel. Mengacu pada teori Dan Nimmo, kredibilitas ini tidak muncul secara instan, melainkan dikonstruksi melalui tiga dimensi fundamental: keahlian (*expertise*), kepercayaan (*trustworthiness*), dan niat baik (*goodwill*).

Dimensi keahlian (*expertise*) dalam komunikasi Anwar Hafid tidak dibangun di atas klaim retorik kosong, melainkan didasarkan pada "bukti forensik" keberhasilan masa lalu. Temuan menunjukkan bahwa narasi kompetensi Gubernur berakar kuat pada *track record* teknokratisnya saat menjabat sebagai Bupati Morowali. Keberhasilan empiris di Morowali, di mana ia mampu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi secara drastis dari 700 menjadi 4.600 mahasiswa hanya dalam kurun waktu dua tahun, berfungsi sebagai aset validasi yang krusial.

Dalam perspektif komunikasi politik, data statistik keberhasilan di Morowali ini bukan sekadar angka, melainkan simbol jaminan kualitas (*guarantee of competence*). Ketika program "Berani Cerdas" diinisiasi di tingkat provinsi dengan skala yang jauh lebih besar dan kompleksitas birokrasi yang lebih tinggi, pengalaman sukses ini menjadi modal kredibilitas yang memitigasi skeptisisme publik. Publik tidak diminta untuk percaya

pada "janji akan datang", melainkan pada "bukti yang telah ada". Hal ini menciptakan persepsi bahwa Gubernur memiliki kapasitas teknis untuk mereplikasi keberhasilan lokal ke level regional.

Dimensi kedua, *trustworthiness*, diuji melalui konsistensi antara retorika kampanye (*rhetorical vision*) dan eksekusi kebijakan (*policy execution*). Dalam ekosistem politik di mana janji sering kali terhenti di mimbar kampanye, Anwar Hafid menegaskan posisi etisnya melalui pernyataan bahwa Program Berani Cerdas lahir dari komitmen untuk memastikan tidak ada anak Sulawesi Tengah yang putus sekolah karena faktor ekonomi, dan ini adalah janji politik yang wajib direalisasikan.

Pernyataan ini merefleksikan apa yang disebut dalam teori Nimmo sebagai integritas komunikator. Konsistensi ini divalidasi oleh observasi Ketua Tim Koalisi Berani, yang mencatat bahwa Gubernur tidak hanya berbicara di forum elit atau ruang ber-AC, tetapi secara konsisten turun ke basis massa, desa-desa dan komunitas mahasiswa untuk mendiskusikan program ini. Pola komunikasi yang persisten ini, yang bergerak dari *high-politics* (kebijakan) ke *low-politics* (interaksi warga), memperkuat persepsi bahwa program ini adalah prioritas utama, bukan sekadar aspek permukaan di dunia politik.

Dimensi ketiga, *goodwill*, termanifestasi melalui gaya komunikasi yang memadukan otoritas formal dengan sentuhan humanis. Tim Komunikasi Gubernur mengungkapkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat dialogis, di mana komunikasi satu arah (*top-down*) diminimalisir demi membuka ruang bagi keluhan, masukan, dan kritik masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Sulawesi Tengah yang paternalistik namun mendambakan egaliterianisme, gaya ini sangat efektif. Mahasiswa penerima beasiswa memberikan testimoni bahwa saat peluncuran program, Gubernur menggunakan bahasa yang sangat sederhana, menghindari jargon teknis birokrasi yang mengintimidasi, sehingga pesan motivasi dapat diterima secara langsung. Keterbukaan ini meruntuhkan jarak psikologis dan menciptakan atmosfer inklusif.

Secara teoritis, temuan ini mengonfirmasi postulat Nimmo bahwa kredibilitas komunikator modern tidak lagi hanya bergantung pada jabatan formal, tetapi pada kemampuan memanusiakan audiens. Anwar Hafid berhasil menggabungkan otoritas legal-rasional (sebagai Gubernur) dengan otoritas karismatik (sebagai bapak bagi mahasiswa), menciptakan legitimasi ganda yang memperkuat penerimaan publik terhadap program.

Konstruksi Pesan Politik: Pendidikan sebagai Hak Universal dan Pesan Restoratif

Analisis terhadap struktur pesan Program Berani Cerdas menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari narasi bantuan sosial (*charity*) menjadi narasi hak dasar (*rights*). Pesan politik dikonstruksi di atas tiga pilar utama: universalitas hak pendidikan, komitmen negara (pemda), dan visi transformasi sosial jangka panjang. Mengadaptasi klasifikasi pesan Nimmo, narasi "Berani Cerdas" dapat dikategorikan sebagai pesan restoratif. Pesan ini bertujuan memulihkan harapan masyarakat yang sempat hilang akibat hambatan struktural kemiskinan. Gubernur secara konsisten membingkai isu ini dengan tiga pesan kunci: pendidikan adalah investasi masa depan, kemiskinan tidak boleh menjadi barier, dan komitmen "satu rumah satu sarjana".

Konstruksi pesan ini sangat strategis karena mengubah posisi psikologis masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat miskin memandang kuliah sebagai hak istimewa orang kaya, pesan Gubernur merekonstruksi pandangan tersebut menjadi hak universal yang dijamin negara. Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Yudiawati V. Windarruslina, berperan vital sebagai *Bureaucratic Translator* yang menerjemahkan pesan filosofis ini menjadi narasi operasional: bahwa pemerintah hadir sebagai solusi konkret atas masalah ketimpangan akses.

Keberhasilan transmisi pesan ini didukung oleh empat faktor utama. *Pertama*, simplifikasi pesan yang membuatnya mudah dicerna semua lapisan strata sosial. *Kedua*, relevansi tinggi dengan *pain point* masyarakat, yakni ketidakmampuan ekonomi. *Ketiga*, sifat aspiratif dari jargon "satu rumah satu sarjana" yang memberikan visi konkret mobilitas sosial. *Keempat*, konsistensi repetisi pesan di berbagai platform.

Lebih jauh, penelitian menemukan adanya kecanggihan dalam *mikro-targetting* pesan. Tim Komunikasi tidak menggunakan satu format pesan untuk semua (*one size fits all*). Sebaliknya, pesan dikemas secara adaptif: video pendek 30-50 detik yang dinamis untuk media sosial (Facebook, Instagram, TikTok), spanduk visual untuk pengguna jalan, dan audio informatif untuk pendengar radio.

Kepala Dinas Pendidikan menambahkan bahwa adaptasi juga dilakukan berdasarkan konteks audiens. Dalam forum teknokratis bersama Rektor dan Kepala Sekolah, pesan disampaikan melalui presentasi data dan diskusi kebijakan. Sebaliknya, dalam perayaan HUT Provinsi yang bersifat seremonial, pesan disampaikan dalam balutan *euforia* pesta rakyat. Diversifikasi kemasan pesan ini menunjukkan kematangan strategi komunikasi yang memahami bahwa penerimaan pesan atau dekoding sangat bergantung pada kesesuaian medium dan konteks psikologis khalayak, sebagaimana diteorikan oleh Nimmo.

Strategi Multi-Channel: Integrasi Ekosistem Media dalam Masyarakat Jejaring

Dalam era *Network Society*, efektivitas komunikasi politik tidak lagi bertumpu pada satu saluran dominan. Program Berani Cerdas menerapkan strategi *Omni-Channel* yang mengintegrasikan tiga matra komunikasi: media konvensional, media digital, dan komunikasi interpersonal. Strategi ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih nyata di geografi Sulawesi Tengah yang kepulauan dan berbukit.

Meskipun penetrasi internet meningkat, media konvensional tetap menjadi pilar legitimasi dan jangkauan bagi demografi usia tua dan masyarakat rural. Ketua Tim Koalisi mencatat bahwa eksposur program di televisi nasional (Metro TV, TVRI, Kompas TV) dan radio (RRI) memberikan bobot kredibilitas yang serius. Liputan media massa arus utama memberikan validasi pihak ketiga (*third-party endorsement*) yang tidak dimiliki oleh media sosial sendiri.

Tim Komunikasi menerapkan strategi hubungan media (*media relations*) yang proaktif melalui rilis pers rutin, fasilitasi peliputan langsung kegiatan Gubernur, dan kerjasama institusional dengan media cetak. Langkah ini krusial untuk menjangkau masyarakat di daerah *blank spot* yang masih mengandalkan radio dan televisi sebagai jendela informasi utama.

Fokus utama untuk target audiens mahasiswa dan Generasi Z diletakkan pada media digital. Gubernur dan timnya menyadari bahwa "pertempuran narasi" untuk anak muda terjadi di layar ponsel. Tim mengelola ekosistem digital yang lengkap: Instagram untuk visual *storytelling*, Facebook untuk komunitas, TikTok untuk viralitas, dan YouTube untuk dokumentasi mendalam. Diferensiasi konten dilakukan secara presisi: TikTok untuk hiburan edukatif ringkas, sementara *website beranicerdas.sultengprov.go.id* berfungsi sebagai hub informasi teknis dan pendaftaran. Inovasi signifikan terlihat pada pelibatan *influencer* lokal. Strategi ini memanfaatkan logika jejaring (*network logic*), di mana pesan yang disampaikan oleh *peer group* atau idola lokal memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi dibandingkan akun resmi pemerintah. Kolaborasi ini mempercepat difusi informasi secara organik di kalangan pemilih muda. Testimoni mahasiswa mengonfirmasi hal ini; banyak yang mengetahui program justru dari siaran langsung (*live*) atau video pendek yang lewat di beranda media sosial mereka, yang kemudian memicu tindakan pendaftaran.

Di tengah gempuran digital, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi tatap muka (*face-to-face*) tetap menjadi "senjata pamungkas" untuk membangun kepercayaan mendalam (*deep trust*). Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa Gubernur secara intensif memanfaatkan panggung kemasyarakatan dan akademik untuk menyelipkan pesan program. Bagi masyarakat kultural Sulawesi Tengah, mendengar langsung dari mulut pemimpin memiliki nilai sakral yang tidak tergantikan oleh layar digital. Mahasiswa mengaku lebih yakin setelah mendengar pidato Gubernur secara langsung di acara festival budaya atau wisuda kampus. Gubernur sendiri menegaskan bahwa pendekatan integratif ini adalah keniscayaan sosiologis: tidak semua daerah punya internet, dan tidak semua orang percaya medsos, sehingga kombinasi koran, radio, spanduk, dan pertemuan langsung adalah strategi totalitas. Sinergi ketiga saluran ini menciptakan resonansi pesan yang kuat, memperluas jangkauan sekaligus memperdalam dampak.

Strategi komunikasi ini diperkuat oleh pemetaan khalayak yang tajam. Tim membagi audiens ke dalam klaster spesifik: mahasiswa (penerima manfaat), orang tua (pendukung), dan masyarakat umum (pemantau). Lebih jauh, segmentasi geografis dilakukan mengingat disparitas infrastruktur antara kota dan pedalaman, yang diatasi melalui MOU berjenjang antara Gubernur dan Bupati.

Karakteristik sosiokultural masyarakat juga menjadi pertimbangan. Kepala Dinas Pendidikan mengidentifikasi bahwa sebagian masyarakat masih skeptis akibat trauma janji politik masa lalu dan lebih percaya pada tokoh otoritas lokal (Kepala Desa, Guru, Ustaz). Oleh karena itu, strategi pelibatan tokoh lokal (*opinion leaders*) menjadi jembatan kepercayaan. Sebaliknya, segmen anak muda menuntut kecepatan dan konten visual ringkas.

Dinamika respons khalayak menunjukkan evolusi dari skeptisisme menuju kepercayaan penuh (*trust*). Mahasiswa Ramzi Baktir merefleksikan transformasi ini: dari keraguan awal ("jangan-jangan hanya janji") menjadi keyakinan setelah melihat bukti pencairan dana pada rekan-rekannya. Data kuantitatif mendukung hal ini. Dari 80.000 pendaftar awal dan 58.000 yang lolos verifikasi adalah bukti tak terbantahkan dari keberhasilan penetrasi pesan. Mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang responsif, seperti penanganan keluhan melalui WhatsApp, semakin memperkuat legitimasi program di mata pengguna. Ini membuktikan tesis Nimmo bahwa khalayak adalah entitas aktif yang terus menafsir ulang pesan berdasarkan realitas yang mereka alami.

Program Berani Cerdas sebagai Inovasi Pembangunan Daerah

Program Berani Cerdas tidak hanya berhasil dikomunikasikan, tetapi substansi program itu sendiri dirancang sebagai sebuah inovasi kebijakan publik yang mendobrak kemapanan birokrasi (*bureaucratic disruption*). Inovasi ini menjadi materi komunikasi yang kuat karena menawarkan diferensiasi yang jelas dibandingkan program beasiswa konvensional.

Gubernur memposisikan program ini dengan *Unique Selling Point* (USP) yang tajam: dukungan menyeluruh (holistik). Bantuan tidak hanya bersifat finansial, tetapi mencakup pengembangan karakter dan keterampilan kerja. Tim Komunikasi merinci tiga aspek diferensiasi utama: (1) Kemudahan akses dengan pemangkasan syarat administratif yang rumit, (2) Cakupan inklusif yang luas, dan (3) Transparansi radikal di mana data dibuka ke publik. Perbandingan dengan program lain (seperti Baznas atau KIP) yang dilakukan oleh mahasiswa menunjukkan keunggulan komparatif "Berani Cerdas". Mahasiswa mengeluhkan birokrasi program lain yang berbelit dan lambat, kontras dengan "Berani Cerdas" yang dinilai mempermudah urusan, transparan, dan pencairannya tunai tanpa potongan. Narasi "kemudahan" ini menjadi viral dan memperkuat citra program sebagai solusi yang berpihak pada rakyat.

Inovasi teknologi menjadi tulang punggung yang memungkinkan diferensiasi tersebut. Pengembangan portal *beranicerdas.sultengprov.go.id* adalah langkah strategis digitalisasi layanan publik. Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran, verifikasi, hingga pengumuman dalam satu ekosistem *cloud*. Bagi komunikasi politik, portal ini bukan sekadar alat administrasi, melainkan instrumen transparansi. Kemampuan publik untuk memantau status secara *real-time* mengurangi asimetri informasi yang biasanya menjadi sumber korupsi. Penggunaan WhatsApp sebagai kanal *customer service* juga menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap perilaku komunikasi masyarakat modern. Sinergi antara kebijakan yang pro-rakyat dan teknologi yang mempermudah akses menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan kepemimpinan Anwar Hafid dari pendahulunya.

Efek Komunikasi dan Kontribusi terhadap Pembangunan SDM serta Tata Kelola

Menggunakan pisau analisis efek komunikasi politik, dampak Program Berani Cerdas dapat dipetakan secara sistematis pada level individu (kognitif, afektif, konatif) hingga level sistemik (pembangunan SDM dan tata kelola pemerintahan). Pada level kognitif, terjadi lonjakan kesadaran publik mengenai hak-hak sipil dalam pendidikan. Ketua Tim Koalisi mencatat bahwa sebelumnya masyarakat tidak menyadari bahwa pemerintah provinsi memiliki wewenang memberikan beasiswa langsung. Program ini berhasil mengedukasi publik tentang desentralisasi peran pendidikan dari pusat ke daerah. Testimoni mahasiswa mengonfirmasi bahwa paparan informasi di media sosial membuka wawasan baru tentang peluang masa depan.

Pada level afektif, terjadi pergeseran sentimen emosional yang signifikan. Rasa apatis terhadap pemerintah berubah menjadi empati dan dukungan. Mahasiswa merasa "disentuh" oleh ketulusan cara Gubernur berkomunikasi, yang mengubah persepsi mereka tentang pemerintah yang biasanya berjarak menjadi entitas yang "hadir" dan peduli. Monitoring sentimen di media sosial menunjukkan grafik positif yang meningkat seiring waktu, memvalidasi strategi komunikasi yang dijalankan.

Pada level konatif, efeknya adalah mobilisasi massa yang masif. Partisipasi puluhan ribu pendaftar adalah indikator perilaku paling nyata. Lebih dalam lagi, terjadi perubahan perilaku ekonomi di tingkat keluarga; mahasiswa yang sebelumnya harus bekerja paruh waktu (ojek online, jaga toko) kini dapat fokus penuh pada studi, yang secara langsung meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Kontribusi terbesar program ini secara makro adalah pergeseran paradigma pembangunan. Secara kuantitatif, komitmen anggaran Rp48 miliar untuk 13.000 mahasiswa (tahap awal) dan target 18.693 mahasiswa berikutnya adalah angka yang masif untuk ukuran APBD. Namun, keberhasilan komunikasi politik Anwar Hafid terletak pada kemampuannya melakukan *reframing* isu anggaran ini. Gubernur secara konsisten menanamkan doktrin bahwa dana pendidikan adalah investasi, bukan Belanja (*expense*). Narasi ini krusial untuk mengamankan dukungan politik di DPRD. Ia berargumen bahwa *return on investment* (ROI) dari program ini tidak akan terlihat dalam siklus pemilu 5 tahunan, melainkan dalam 10-15 tahun ke depan saat generasi ini memimpin daerah. Ketua Tim Koalisi memperkuat argumen ini dengan proyeksi lahirnya ribuan profesional (dokter, insinyur, birokrat) yang akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah.

Dampak pemerataan juga sangat menonjol. Program ini menembus batasan geografis, menjangkau mahasiswa di kepulauan terpencil seperti di Tojo Una-Una yang sebelumnya terisolasi dari akses informasi. Dengan membagi jalur prestasi dan afirmasi, program ini memastikan keadilan distributif. Secara kualitatif, ini menciptakan perubahan *mindset* kolektif: memutus rantai kemiskinan dengan menanamkan keyakinan bahwa "anak kampung juga bisa sukses". Ini adalah strategi *counter-brain drain* yang efektif; dengan membangun

ikatan emosional melalui beasiswa daerah, lulusan diharapkan memiliki loyalitas untuk kembali membangun kampung halamannya.

Terakhir, Program Berani Cerdas berkontribusi pada reformasi budaya birokrasi. Transparansi data penerima beasiswa (nama, prodi, asal) yang dapat diakses publik adalah terobosan radikal yang meminimalkan ruang gerak praktik percaloan dan nepotisme. Mahasiswa mengapresiasi keterbukaan ini sebagai bentuk keadilan (*fairness*). Akuntabilitas dijaga melalui pengawasan berlapis (Inspektorat, BPK, Tim Monitoring Independen), yang dikomunikasikan secara terbuka kepada publik untuk membangun kepercayaan. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa akuntabilitas ini adalah bagian dari strategi komunikasi politik untuk membangun legitimasi. Ditambah dengan responsivitas tinggi terhadap pengaduan, program ini menjadi etalase (*showcase*) bagaimana prinsip *Good Governance* (transparansi, akuntabilitas, responsivitas) dapat dioperasionalkan secara konkret, bukan sekadar jargon teoretis. Keberhasilan tata kelola program ini menciptakan tekanan positif (*spillover effect*) bagi sektor pemerintahan lain untuk meningkatkan standar layanan mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam era otonomi daerah dan masyarakat jejaring komunikasi politik telah bertransformasi dari sekadar instrumen elektoral menjadi strategi vital tata kelola pemerintahan. Analisis terhadap Program Berani Cerdas di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh desain teknokratisnya, tetapi oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan untuk menjembatani kesenjangan antara retorika politik dan realitas birokrasi. Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan rekonstruksi ulang dari model klasik Dan Nimmo dengan mengintegrasikan perspektif jaringan digital. Temuan utama studi ini dapat disimpulkan dalam empat poin penting:

1. Transformasi Aktor Politik: Gubernur Anwar Hafid berhasil mereposisi peran komunikator dari sekadar politisi menjadi *Policy Entrepreneur*. Kredibilitasnya tidak dibangun di atas janji futuristik semata, melainkan divalidasi oleh "bukti forensik" rekam jejak keberhasilan masa lalu di Morowali. Hal ini menciptakan legitimasi hibrida: perpaduan antara otoritas legal-formal sebagai gubernur dan otoritas moral sebagai pemimpin yang terbukti berkinerja.
2. Hibriditas Media dan Validasi Jejaring: Studi ini menolak asumsi komunikasi linier *top-down*. Efektivitas penyampaian pesan Program Berani Cerdas terletak pada strategi *omni-channel* yang menggabungkan validitas media konvensional, viralitas media digital, dan sentuhan personal komunikasi tatap muka. Khalayak (mahasiswa) tidak lagi bertindak sebagai konsumen pasif, melainkan bertransformasi menjadi *Network Validators* yang memverifikasi dan mengamplifikasi keberhasilan program melalui kesaksian digital (*digital testimonials*), yang secara efektif meruntuhkan skeptisisme publik.
3. Komunikasi sebagai Pengendali Birokrasi: Komunikasi politik berfungsi sebagai mekanisme pemaksa (*enforcing mechanism*) bagi kinerja birokrasi. Janji politik "tanpa syarat rumit" yang disuarakan Gubernur memaksa Dinas Pendidikan (sebagai *Bureaucratic Translator*) untuk melakukan inovasi layanan dan memangkas rantai birokrasi. Transparansi data yang dibuka ke publik melalui portal digital menjadi instrumen akuntabilitas yang meminimalisir distorsi implementasi.
4. Reframing Anggaran: Gubernur sukses melakukan reframing narasi anggaran daerah, mengubah persepsi "biaya pendidikan" menjadi "investasi modal manusia". Narasi restoratif ini berhasil membangun

konsensus politik di DPRD dan dukungan publik, menempatkan pendidikan bukan sebagai beban fiskal, tetapi sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan dan pencegahan *brain drain*.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model resonansi Kebijakan Afirmatif yang ditawarkan studi ini secara kuantitatif. Survei eksplanatif dapat dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel *digital trust* dan *peer validation* terhadap partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Studi longitudinal juga diperlukan dalam konteks studi lanjutan bersifat longitudinal untuk melihat apakah *political will* dan strategi komunikasi ini dapat bertahan melampaui siklus elektoral, serta bagaimana dampaknya terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Tengah dalam jangka panjang (5-10 tahun ke depan). Komparasi Lintas Daerah: Studi perbandingan dengan daerah lain yang memiliki program serupa namun gagal, akan sangat berharga untuk mengisolasi variabel komunikasi politik sebagai faktor penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah inovasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). Syakira Media Press
- Buluamang, Y. M. O., & Handika, L. P. (2018). Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(1), 57-72
- Cangara, H. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori Dan Strategi*. Rajawali Pers.
- Dijk, Jan A. G. M. Van. (2013). Digital Democracy: Vision and Reality. *Innovation and the Public Sector*, 19, no. August: 49-62
- Engjelima, K., Nomleni, J., Sumartias, S., & Setiawan, W. (2019). Komunikasi sosial pemerintah dalam penyebaran informasi perbatasan Negara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 251-263.
- Fattha, N. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Meyniar Albina, Ed.). Bandung, CV. Harfa Creative.
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. Sustainability (Switzerland) *Jurnal Komunikasi Politik*, 10, no. 1: 1-14.
- Hidayat, D dkk. (2025). *Komunikasi Masa Dan Media Digital*. Simbiosis Rakatama Media
- Kaina, H. D. Zainab, N. U. Lamnur, S. R. Fatimah, H. S. Sampurna, A. (2024). "Komunikasi Politik: Definisi Dan Konsep." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 5: 2107–14.
- Lopulalan, D. L. Y. (2023). Komunikasi Politik dalam Pemerintahan. *Komunikasi Politik*, 2, 20.
- Mukarom, Zaenal. (2016). *Komunikasi Politik*. Pustaka Setia.
- Nimmo, D. (2010). *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek* (Jalaludin rahmad, Ed). Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media* (Jalaludin rahmad, Ed.; 7th Ed). PT Remaja Rosdakarya
- Nofria, U.S, Frinaldi, A (2025) "Inovasi pemerintahan daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik" *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 5 No. 2*
- Priyatna, C., Ari, F. X., Prastowo, A., Syuderajat, F., & Sani, A. (2020). Optimalisasi teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam aktivitas komunikasi publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8(1), 45363.
- Sampurna, A., Taufiqurrohman, A., Nasution, A. F., Pulungan, N. L., Faidah, Y., & Daulay, V. D. Y. (2024). "Konsep Dan Definisi Komunikasi Politik." *Jurnal Pendidikan vol. 8 no 2*
- Sampurna, A., Wulandari, L., Husna, S., Diki, W.I., Lil, A.R (2024) "Karakteristik Pesan Dalam Komunikasi Politik" *Jurnal Komunikasi Islam Vol.5, No. 1*
- Sjoraida, D. F. (2025). Komunikasi Politik di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Opini Publik. *Jurnal Komunikasi Politik*, 12, no. 1: 227-236.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syauket, A., Indriasari, R., Mendrofa, K. E. D., & Cabui, E. C. (2024). *Komunikasi Politik Pemerintahan*.